

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kemantren Gondomanan

Implementation of Poverty Alleviation Policies in Gondomana Sub-district

Cahya Wijayanta^{a*}, Sugiyanto^b

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD^{a,b}
wijayantac@gmail.com, probosugiyanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan kerangka *policy output* dan *policy outcomes*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program seperti PKH dan BST berkontribusi dalam menekan kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dari sisi output, cakupan program cukup luas, namun masih ditemukan bias sasaran akibat akurasi DTKS yang rendah, keterbatasan akses, serta dominasi bantuan konsumtif. Sementara itu, outcome awal memperlihatkan dampak positif, seperti meningkatnya partisipasi sekolah dan pemanfaatan layanan kesehatan, meski persoalan struktural seperti keterbatasan lapangan kerja dan ketimpangan pendapatan belum teratasi.

Kata Kunci: Implementasi Kemiskinan, Policy Output, Policy Outcomes

Abstrak

This study analyzes the implementation of poverty alleviation policies in Kemantren Gondomanan, Yogyakarta City, using the policy output and policy outcomes framework. The research employed a qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation, analyzed with Miles & Huberman's interactive model. The findings reveal that programs such as the Family Hope Program (PKH) and Cash Social Assistance (BST) contributed to reducing poverty by improving access to education, health services, and social protection. In terms of policy output, the coverage is relatively wide, yet targeting bias persists due to inaccurate DTKS data, limited access, and a dominance of consumptive aid over empowerment. Meanwhile, initial policy outcomes show positive impacts, including higher school participation and better health service utilization, although structural issues such as limited employment opportunities and income inequality remain unresolved.

Kata Kunci: Implementation of Poverty, Policy Output, Policy Outcomes

1. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan utama pembangunan di Indonesia meskipun berbagai program telah dijalankan (Nengyanti et al., 2019). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kekurangan materi, tetapi juga menyangkut kerentanan sosial, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Data BPS Maret 2024 mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 9,03% atau 25,22 juta jiwa, sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru mencatat tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa sebesar 10,83% dengan rasio gini 0,449, menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan.

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin DIY

Periode	Persentase	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
Maret 2021	12,80%	506,45
Maret 2022	11,34%	454,76
Maret 2023	11,04%	448,47
Maret 2024	10,83%	445,55

Berbagai kebijakan, termasuk status keistimewaan DIY berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012, diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, efektivitasnya masih terbatas. Di tingkat Kota Yogyakarta, angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, tetapi fluktuasi di tingkat lokal, khususnya Kemantren Gondomanan, memperlihatkan masih adanya tantangan struktural seperti rendahnya pendidikan, akses kerja, dan ketimpangan ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Keluarga Sasaran Penerima Perlindungan Jaminan Sosial Kemantren Gondomanan

Kelurahan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Ngupasan	100	99	116	79
Prawirodirjan	346	416	519	335

Penelitian terdahulu Dari et al. (2022); Issundari & Yani (2021); Nugraha (2022); Rahman & Alqarni (2023); Saragih (2019); Sipahutar et al. (2024) lebih banyak menyoroti kebijakan di tingkat provinsi atau kota, serta program tertentu seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Gandeng Gendong. Namun, kajian spesifik di tingkat kemantren dengan pendekatan evaluasi *policy output* dan *policy outcomes* masih jarang dilakukan. Padahal, level ini penting karena menjadi ujung tombak implementasi kebijakan di masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Tujuannya adalah mendeskripsikan proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis *policy output* dan *policy outcomes* yang dihasilkan. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan di level lokal, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat setempat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kebijakan, aktor, serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul di lapangan.

Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti aparat pemerintah kemantren, pendamping PKH, tokoh masyarakat, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta publikasi terkait kebijakan pengentasan kemiskinan di Yogyakarta.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan relevansi dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, dengan cara membandingkan informasi dari berbagai narasumber dan dokumen untuk memperoleh konsistensi data.

Tabel 3. Data Penelitian, Informasi dan Sumber Data, dan Metode

Data Penelitian	Informasi dan Sumber Data	Metode
Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan pada Kemantren Gondomanan	1. Pemkot Yogyakarta	Dokumentasi (Sekunder)
	2. Dinas Sosial Yogyakarta	
	3. Bappeda Yogyakarta	
	4. Kemantren Gondomanan	
	5. Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kemantren Gondomanan	
Indikator Implementasi Kebijakan Kemiskinan Berdasarkan <i>Policy Output</i> dan <i>Policy Outcomes</i>	1. Kemantren Gondomanan	Dokumentasi dan Interview
	2. Kelurahan Ngupasan	
	3. Kelurahan Prawirodirjan	
	4. Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kemantren Gondomanan	
	5. Penerima Manfaat Kebijakan	

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles & Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis difokuskan pada dua kerangka evaluasi, yakni *policy output* (cakupan, bias, akses, relevansi program) dan *policy outcomes* (*initial*, *intermediate*, dan *long-term outcomes*), sehingga mampu menggambarkan sejauh mana kebijakan penanggulangan kemiskinan memberikan dampak nyata di tingkat local (Saragih, 2019; Zaini, 2021).

Tabel 4. Matriks Pengukuran *Policy Output* dan *Policy Outcomes*

Indikator	Pengukuran
<i>Policy Output</i>	Cakupan
	Bias
	Akses
	Kesesuaian program
<i>Policy Outcomes</i>	<i>Initial outcome</i> merupakan hasil keluaran kebijakan
	<i>Intermediate outcome</i> merupakan hasil jangka menengah
	<i>Long-term outcome</i> merupakan hasil jangka panjang

Dengan desain metodologi ini, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang akurat mengenai efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis temuan empiris bagi pemerintah daerah. Pada penelitian yang dilakukan untuk mengukur *policy outcomes* hanya menggunakan *intial outcomes* karna terdapat keterbatasan waktu penelitian.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kemantren Gondomanan

Permasalahan kemiskinan di Yogyakarta masih menjadi agenda prioritas khususnya di Kemantren Gondomanan. Pemerintah Kemantren Gondomanan, menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sejalan dengan program strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah DIY, khususnya melalui pendekatan data dan intervensi lintas sektor. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikombinasikan dengan DTKS, tercatat bahwa jumlah warga miskin di Kemantren Gondomanan sebanyak 922 jiwa, terdiri atas 843 jiwa miskin non-ekstrem dan 92 jiwa miskin ekstrem. Selain itu, kelompok rentan miskin juga teridentifikasi sebanyak 1.204 jiwa yang terdiri dari lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Oleh karena itu, pemerintah kemantren fokus melakukan intervensi berdasarkan kategori tersebut, dengan memastikan setiap program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi tepat sasaran.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, salah satunya dilaksanakan melalui PKH, yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sangat miskin melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2023). Program ini menyasar KPM yang termasuk dalam DTKS dan telah diverifikasi oleh petugas sosial di tingkat kelurahan dan kemantren selama tahun 2025 tercatat sebanyak 485 orang merupakan KPM PKH Kemantren Gondomanan, dengan rincian Kelurahan Prawirodirjan 377 orang, dan Kelurahan Ngupasan 108 orang.

Melalui pelaksanaan PKH dan intervensi lainnya, Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga berada pada kisaran 6,07% hingga 6,60% pada tahun 2025, dari angka sebelumnya yaitu 6,49% pada tahun 2023 (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021). Oleh karena itu, upaya percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem juga dipadukan dengan program pensasaran yang berbasis data dan inklusif. Dalam konteks lokal Gondomanan, kebijakan ini juga ditunjang oleh peran aktif pendamping PKH yang melakukan monitoring langsung terhadap perkembangan keluarga penerima manfaat, serta koordinasi lintas sektor dengan unit layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut.

Selain membantu aspek konsumsi dasar, PKH juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan akses warga miskin terhadap layanan publik. Dengan dukungan alokasi anggaran dari pusat dan daerah serta integrasi dengan program nasional lainnya seperti P3KE dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PKH diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Gondomanan hingga mendekati target kota, yaitu di bawah 6% pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari berbagai pihak, seperti Lurah Ngupasan, dan Lurah Prawirodirjan menyatakan bahwa:

"Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Ngupasan dimulai dari merencanakan bersama masyarakat/tokoh masyarakat melalui kegiatan musrenbang dengan mengusulkan kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah yang diperlukan oleh masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Perencanaan dalam mengatasi masalah kemiskinan di kalurahan Prawirodirjan dilakukan dengan cara musyawarah antara

pemangku kepentingan di kalurahan Prawirodirjan. Program-program yang akan diadakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dirancang berdasarkan urgensi yang terdapat pada kalurahan Prawirodirjan dengan mempertimbangkan peraturan dan dana yang tersedia, berbagai macam pelatihan dilakukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat”

Secara umum, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan, khususnya melalui pelaksanaan PKH, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Responden mendukung pendekatan pemerintah yang mengedepankan kolaborasi antar-instansi, perbaikan sistem pendataan, dan pelibatan masyarakat sebagai subjek perubahan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini dinilai sudah berjalan secara sistematis dan relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat miskin di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan oleh koordinator pendamping PKH dalam wawancara sebagai berikut:

”Pelaksanaan program PKH di wilayah Kemantren Gondomanan terlaksana dengan baik. Mekanisme pendampingan terhadap peserta PKH dengan cara melakukan assesment terhadap KPM, pendampingan KPM melalui pertemuan kelompok, pemutakhiran data, pemberdayaan, dan motivasi”

Berdasarkan laporan penanggulangan kemiskinan Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan 2024 dan rencana 2025 program PKH yang telah dilakukan disebagian besar wilayah Yogyakarta khususnya Kemantren Gondomanan telah membawa dampak yang positif. Program ini mampu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, yang merupakan syarat utama penerimaan bantuan. Berdasarkan temuan di lapangan, sebagian besar keluarga penerima manfaat memanfaatkan bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti membeli bahan pangan, membayar biaya sekolah anak, serta pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita. Dampak positif ini terlihat dari meningkatnya angka partisipasi sekolah di kalangan anak keluarga penerima PKH serta menurunnya angka stunting melalui pemeriksaan rutin di fasilitas kesehatan. Selain itu, PKH berperan dalam mengurangi beban ekonomi keluarga miskin sehingga dapat menurunkan kerentanan mereka terhadap guncangan sosial dan ekonomi.

Faktor Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kemantren Gondomanan

1. Kelembagaan TKPK dan Koordinasi Lintas OPD

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan mendapat dukungan dari berbagai aspek: Regulasi dan Program Pemerintah – Adanya kebijakan nasional seperti PKH dan BST yang diadopsi di tingkat lokal, dengan dukungan teknis dari Dinas Sosial dan Bappeda, Peran Pendamping PKH – Pendamping berperan aktif melakukan pendataan, verifikasi, serta pendampingan keluarga penerima manfaat (KPM). Misalnya, seorang pendamping menyatakan:

”Kami rutin melakukan pertemuan P2K2 untuk memberikan pemahaman kepada keluarga penerima agar bisa memanfaatkan bantuan dengan baik.”

Partisipasi Masyarakat – KPM mengikuti pertemuan kelompok dan beberapa berhasil lulus mandiri dari PKH. Kolaborasi Lintas Pihak – Peran TKSK (Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan), kelurahan, dan lembaga pendidikan lokal yang membantu sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat.

2. Ketersediaan dan Pemutakhiran Basis Data (DTKS dan SIKS-NG)

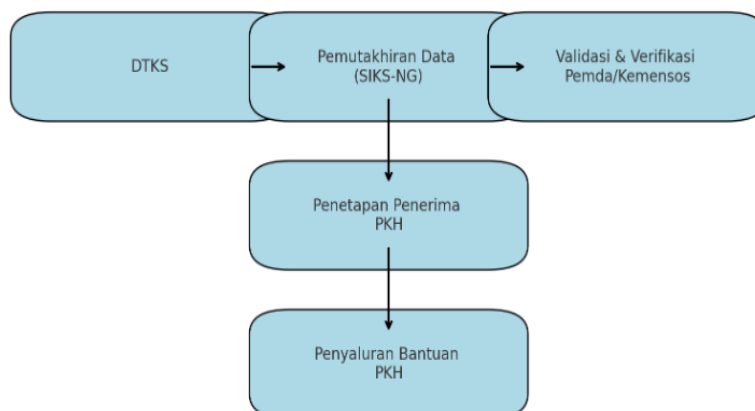
DTKS merupakan basis data resmi nasional yang mencakup informasi keluarga prasejahtera dan rentan berdasarkan kondisi sosial-ekonomi mereka, serta menjadi rujukan utama untuk penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT, PBI-JK, dan program lainnya (Kemensos, 2020). Sementara itu, SIKS-NG adalah platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Kemensos untuk memudahkan pengelolaan, pemutakhiran, dan integrasi DTKS secara real-time dan berbasis web. Melalui SIKS-NG, data dari tingkat desa atau kelurahan dapat diinput, diverifikasi, dan disinkronkan dengan sistem pusat, memastikan ketepatan sasaran bantuan serta mendukung proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, integrasi data lewat DTKS dan SIKS-NG turut mengatasi permasalahan ketidaksinkronan antar aplikasi for instance, antara e-PKH dan SIKS-NG yang dapat menyebabkan data penerima tidak terupdate atau tidak terbaca secara akurat. Dengan perbaikan sistem data ini, diharapkan PKH dapat lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam mendistribusikan bantuan, sekaligus mempermudah monitoring, evaluasi, dan upaya graduasi keluarga penerima keluar dari garis kemiskinan.

Data yang masuk melalui SIKS-NG selanjutnya melalui tahapan validasi dan verifikasi oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial. Tahap ini penting untuk memastikan keakuratan informasi, mencegah adanya penerima ganda, serta menghindari inclusion error (masyarakat mampu yang menerima bantuan) maupun exclusion error (masyarakat miskin yang belum terdata). Setelah proses verifikasi selesai, barulah ditetapkan daftar KPM PKH secara resmi.

Hasil penetapan inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan penyaluran bantuan PKH, baik berupa bantuan tunai bersyarat maupun program pendampingan sosial seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Dengan mekanisme ini, ketersediaan dan pemutakhiran basis data melalui DTKS dan SIKS-NG menjadi instrumen vital dalam memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Gambar 1. Diagram Alur Proses DTKS, SIKS-NG, dan Penetapan PKH



Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kemantren Gondomanan

Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan masih menghadapi sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah masalah validitas data dalam DTKS. Masih sering ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga miskin tidak tercatat (*exclusion error*), sementara warga yang sebenarnya sudah mampu justru masih menerima bantuan (*inclusion error*) (Larasati, 2018). Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Seorang lurah mengungkapkan:

“Masih ada warga yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak masuk data, sementara ada juga yang sebenarnya sudah mampu tapi masih menerima. Ini sering jadi keluhan masyarakat di kelurahan.”

Kendala lain adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan. Selama ini, porsi terbesar anggaran lebih banyak terserap pada program bantuan konsumtif seperti PKH dan BST, sementara program peningkatan kapasitas masyarakat miskin masih terbatas. Akibatnya, masyarakat penerima cenderung pasif dan belum terdorong untuk mandiri secara ekonomi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pendamping PKH:

“Bantuan memang membantu kebutuhan sehari-hari, tapi kalau tidak ada program pemberdayaan tambahan, keluarga tetap saja bergantung pada bantuan.”

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga belum berjalan optimal. Terdapat tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, hingga tingkat kemantren, terutama terkait pembaruan data dan pemantauan program. Keterbatasan komunikasi dan sinergi lintas sektor sering kali membuat kebijakan tidak sepenuhnya efektif di tingkat lapangan.

Hambatan berikutnya adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, khususnya pendamping sosial yang jumlahnya terbatas. Dengan beban kerja yang tinggi, pendamping kesulitan menjangkau seluruh keluarga penerima manfaat secara intensif. Sementara itu, sebagian masyarakat penerima masih rendah dalam hal literasi keuangan dan pemanfaatan bantuan. Hal ini berdampak pada keberlanjutan program karena bantuan lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif daripada investasi jangka panjang.

Terakhir, terdapat kecenderungan ketergantungan pada program pusat yang membuat ruang inovasi di tingkat kemantren sangat terbatas. Program-program yang dijalankan cenderung mengadopsi model dari pemerintah pusat tanpa banyak penyesuaian dengan kondisi sosial-ekonomi lokal Gondomanan. Akibatnya, solusi yang ditawarkan kurang menyentuh akar masalah kemiskinan, seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal.

Analisis Indikator Policy Output

Analisis *policy output* dalam penelitian ini menekankan pada sejauh mana kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan mampu menghasilkan keputusan, tindakan, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Empat indikator yang digunakan yaitu cakupan, bias, akses, dan kesesuaian program.

1. Indikator Cakupan

Cakupan program penanggulangan kemiskinan cukup luas karena melibatkan berbagai bentuk intervensi, seperti PKH, BST, serta program pemberdayaan

masyarakat. Data menunjukkan lebih dari 500 KPM di Kota Yogyakarta, termasuk di Gondomanan, berhasil lulus baik secara alami maupun mandiri sepanjang 2024. Untuk mendukung strategi tersebut, Kemantren Gondomanan memiliki sistem informasi. Hal ini seperti disampaikan oleh ketua tim penanggulangan kemiskinan kemantren gondomanan sebagai berikut:

“Pada prinsipnya di Kemantren Gondomanan kebijakan penanggulangan kemiskinan mengacu pada strategi penanggulangan kemiskinan nasional. Terdapat empat pokok seperti bantuan tunai, bantuan akses Pendidikan dan Kesehatan, bantuan pendampingan sosial, dan bantuan komplementer lain”

Lebih lanjut berdasarkan data studi literatur Bappeda Kota Yogyakarta (2023), cakupan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menjangkau sebagian besar keluarga miskin di Kemantren Gondomanan. Data DTKS menjadi dasar penentuan penerima manfaat, sehingga distribusi program lebih tepat sasaran. Hasil validasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menunjukkan bahwa lebih dari 90% rumah tangga miskin di wilayah ini telah memperoleh akses terhadap minimal satu program intervensi sosial. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan memiliki cakupan yang luas, meskipun masih ada keterbatasan bagi kelompok miskin baru yang belum masuk dalam DTKS.

Menurut Bappeda Kota Yogyakarta, cakupan yang tinggi ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah kota, kemantren, dan kelurahan melalui pemutakhiran data dan pendampingan sosial. Program prioritas yang disampaikan dalam RPJMD Kota Yogyakarta juga menegaskan target penurunan kemiskinan menjadi 6% pada 2024, sehingga peningkatan cakupan program menjadi indikator kinerja yang penting. Namun demikian, Bappeda mengakui masih terdapat tantangan, seperti dinamika data kemiskinan akibat migrasi dan perubahan status ekonomi masyarakat, yang berpengaruh terhadap ketepatan cakupan intervensi.

2. Indikator Bias

Bias ini terlihat dalam dua bentuk utama, yaitu *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* terjadi ketika keluarga yang seharusnya tidak lagi layak, misalnya sudah memiliki kondisi ekonomi lebih baik, tetap tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, *exclusion error* muncul ketika keluarga miskin yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak terdaftar dalam DTKS atau tidak menerima bantuan karena masalah administrasi dan keterlambatan verifikasi.

Hasil wawancara dengan Koordinator PKH Gondomanan menunjukkan adanya kasus penerima bantuan yang sudah tidak lagi miskin, namun tetap terdaftar sebagai KPM. Ia menegaskan bahwa:

“Kadang ada KPM yang ekonominya sudah membaik, bahkan punya kendaraan, tapi tetap menerima bantuan. Sebaliknya, ada keluarga miskin yang tidak masuk daftar. Inilah bias yang sulit dihindari tanpa pemutakhiran data yang rutin.”

Pernyataan ini memperlihatkan bagaimana kelemahan dalam pemutakhiran data berdampak pada ketidakakuratan penerima bantuan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Lurah Ngupasan, yang menyebutkan bahwa masih ada keluarga miskin yang tidak masuk dalam DTKS meskipun kondisinya layak menerima PKH. Ia menyatakan:

“Masih ada warga miskin yang belum masuk data DTKS, padahal kondisinya jelas membutuhkan bantuan. Kami di kelurahan sering mengusulkan, tapi proses sinkronisasi data butuh waktu lama.”

Analisis dokumen dari Bappeda Kota Yogyakarta (2024) juga menyoroti masalah serupa, bahwa salah satu kelemahan implementasi PKH adalah tingginya *inclusion error* dan *exclusion error* akibat belum optimalnya akurasi DTKS. Hal ini diperkuat oleh laporan Forum TKPK Kota Yogyakarta 2024 yang menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam penanggulangan kemiskinan adalah sinkronisasi data lintas instansi yang belum berjalan maksimal.

Dengan demikian, indikator bias dalam pelaksanaan PKH di Gondomanan masih cukup tinggi. Meskipun cakupan penerima program sudah luas, ketidaktepatan sasaran mengurangi efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan. Adanya penerima yang tidak layak tetap mendapat bantuan (*inclusion error*), serta keluarga miskin yang terlewat dari daftar penerima (*exclusion error*), menandakan bahwa kebijakan ini masih menghadapi persoalan serius pada aspek tata kelola data dan koordinasi. Jika masalah bias ini tidak segera diatasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan sosial dapat menurun, dan tujuan utama PKH sebagai program penanggulangan kemiskinan tidak akan tercapai secara optimal.

3. Indikator Akses

Indikator akses dalam evaluasi *policy output* PKH merujuk pada sejauh mana KPM dapat memanfaatkan layanan dasar yang menjadi syarat program, seperti pendidikan, kesehatan, serta pendampingan sosial. Keberhasilan indikator ini tercermin dari peningkatan kehadiran anak di sekolah, kepatuhan ibu hamil dan balita dalam pemeriksaan kesehatan, serta keterlibatan aktif KPM dalam kegiatan pertemuan kelompok P2K2.

Dari sisi pendidikan, data responden menunjukkan bahwa sebagian besar anak dari keluarga penerima PKH di Gondomanan telah memanfaatkan dukungan ini untuk memastikan keberlanjutan sekolah. Salah satu penerima manfaat menuturkan:

“Bantuan PKH sangat membantu untuk membeli perlengkapan sekolah anak, jadi mereka bisa terus bersekolah tanpa harus berhenti di tengah jalan.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa bantuan PKH tidak hanya menambah daya beli keluarga miskin, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen proteksi agar anak-anak tidak putus sekolah. Pendamping PKH juga menegaskan bahwa mereka rutin melakukan monitoring absensi sekolah, di mana target minimal 85% kehadiran dipantau melalui koordinasi dengan pihak sekolah.

Pada aspek kesehatan, mayoritas responden menyampaikan bahwa mereka kini lebih rutin memanfaatkan layanan posyandu dan puskesmas. Salah seorang ibu penerima PKH mengatakan:

“Sejak ikut PKH, saya jadi rutin membawa anak ke posyandu untuk timbang badan dan imunisasi. Kalau dulu kadang tidak sempat, sekarang jadi kewajiban.”

Hal ini sesuai dengan komitmen program PKH, di mana keluarga penerima diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, serta lansia secara berkala. Lurah Ngupasan dalam wawancara juga menambahkan bahwa pihak

kelurahan mendukung program ini dengan memfasilitasi kegiatan posyandu agar akses layanan kesehatan bagi warga miskin semakin mudah.

4. Indikator Kesesuaian Program

Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan telah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh kelompok sasarannya, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah tersebut. Indikator ini dipergunakan untuk menilai apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran di Kemantren Gondomanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Pada indikator ini fokus pada persepsi kelompok sasaran penerima bantuan untuk menentukan sejauh mana bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Dari hasil penelitian dan wawancara, terlihat bahwa sebagian besar KPM di Kemantren Gondomanan merasakan manfaat PKH sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada aspek pendidikan, responden mengungkapkan bahwa bantuan tunai PKH sangat membantu untuk meringankan biaya sekolah. Salah satu KPM menyatakan:

“Uang PKH saya pakai untuk beli seragam dan buku sekolah anak, jadi mereka bisa sekolah dengan tenang.”

Hal ini memperlihatkan bahwa program PKH relevan dengan kebutuhan keluarga miskin yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan dasar. Pendamping PKH juga menambahkan bahwa tanpa bantuan ini, risiko anak putus sekolah di wilayah Gondomanan akan lebih tinggi.

Pada aspek kesehatan, program PKH mendorong keluarga miskin untuk mengakses layanan kesehatan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan. Seorang ibu penerima bantuan menuturkan:

“Sejak ada PKH, saya jadi lebih rajin membawa anak ke posyandu, karena memang diwajibkan. Itu membantu sekali karena kesehatan anak lebih terpantau.”

Hal ini menunjukkan kesesuaian program dengan kebutuhan keluarga miskin yang seringkali abai terhadap pemeriksaan kesehatan rutin karena faktor biaya maupun keterbatasan pengetahuan. Dukungan kelurahan dalam menyediakan sarana posyandu juga memperkuat akses layanan dasar ini.

Secara umum, indikator kesesuaian program dengan kebutuhan di Kemantren Gondomanan menunjukkan hasil positif. Bantuan PKH terbukti relevan dengan kebutuhan utama KPM, yaitu pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta keterampilan pengelolaan rumah tangga. Program ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan, meskipun masih perlu perbaikan dalam hal besaran bantuan dan fleksibilitas layanan agar lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat miskin.

Analisis Indikator *Policy Outcomes*

Analisis *outcomes* kebijakan dalam PKH di Kemantren Gondomanan mencakup tiga level, yaitu *initial outcome* (hasil awal kebijakan). *Initial outcome* merujuk pada hasil-hasil awal yang langsung dirasakan oleh KPM setelah kebijakan PKH dilaksanakan (Syamsulhakim & Khadijah, 2020). Di Kemantren Gondomanan, *outcomes* awal ini paling terlihat pada tiga aspek: akses pendidikan, pemanfaatan layanan kesehatan, dan perubahan perilaku konsumsi serta keuangan rumah tangga.

Dalam akses pendidikan hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan PKH secara langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, seperti seragam, buku, dan transportasi. Salah satu responden menyatakan:

“Uang PKH saya pakai untuk beli seragam dan buku sekolah anak, jadi mereka bisa sekolah dengan tenang tanpa saya bingung cari biaya tambahan.”

Pendamping PKH juga menegaskan bahwa syarat minimal kehadiran 85% di sekolah membuat orang tua lebih memperhatikan kedisiplinan anak. Koordinator PKH menyebutkan bahwa monitoring rutin dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah untuk memastikan anak KPM tidak mengalami putus sekolah. Hal ini sejalan dengan temuan Bappeda Kota Yogyakarta (2023) yang mencatat bahwa PKH berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya di tingkat SMP dan SMA, di kawasan perkotaan.

Selanjutnya, pemanfaatan layanan Kesehatan, PKH mendorong keluarga miskin untuk lebih aktif mengakses layanan posyandu, imunisasi, serta pemeriksaan ibu hamil dan balita. Responden dari kelompok perempuan penerima PKH menuturkan:

“Sejak ada PKH, saya jadi rutin membawa anak ke posyandu karena diwajibkan, itu membuat kesehatan anak lebih terpantau.”

Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa materi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) seperti gizi seimbang, pencegahan stunting, dan kesehatan ibu-anak menjadi pendorong keluarga lebih sadar pentingnya pemeriksaan rutin. Data Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (2023) memperkuat hal ini, dengan mencatat adanya peningkatan angka kunjungan balita ke posyandu di wilayah perkotaan, termasuk Gondomanan.

Selain dampak pada pendidikan dan kesehatan, *initial outcomes* juga muncul dalam pola pengelolaan keuangan keluarga. Beberapa KPM menyatakan bantuan PKH membantu mereka mengurangi praktik pinjaman harian berbunga tinggi. Salah satu responden mengatakan:

“Dulu kalau ada kebutuhan mendadak, saya harus hutang ke tetangga atau rentenir. Sekarang lebih tenang karena ada PKH yang bisa dipakai untuk kebutuhan pokok.”

Hal ini sejalan dengan laporan World Bank (2021) tentang evaluasi PKH, yang menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat ini berfungsi sebagai *social safety net* untuk menjaga daya beli masyarakat miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus berutang.

Akurasi data menjadi faktor penting dalam memastikan *outcomes* awal tercapai. Menurut Forum TKPK Kota Yogyakarta (2024), penggunaan KSJPS 2024 sebagai basis data kemiskinan telah membantu memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial, termasuk PKH. Hal ini juga terlihat dari data Kemantren Gondomanan, di mana jumlah keluarga miskin di Kelurahan Ngupasan turun dari 116 jiwa (2023) menjadi 79 jiwa (2024), dan di Prawirodirjan dari 519 jiwa (2023) menjadi 335 jiwa (2024). Meskipun

penurunan ini tidak bisa sepenuhnya dikaitkan hanya dengan PKH, data tersebut menunjukkan bahwa intervensi program perlindungan sosial, termasuk PKH, telah memberi kontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat (Asyavira et al., 2024; Dyas & Agustina, 2024; Sawitri & Rahmat, 2024; Wijayanti et al., 2025).

Tabel 5. Ringkasan Initial Outcome PKH Kemantren Gondomanan

Aspek	Indikator Capaian Awal	Data Pendukung
Pendidikan	Anak KPM tetap bersekolah, kebutuhan seragam & buku terpenuhi, kepatuhan hadir $\geq 85\%$	Partisipasi sekolah naik 4–6% (2021–2023)
Kesehatan	KPM rutin ke posyandu, imunisasi lengkap, ANC meningkat	Kunjungan posyandu naik 8,2%; imunisasi dasar lengkap 92% (2023)
Keuangan	Mengurangi pinjaman berbunga tinggi, konsumsi rumah tangga lebih stabil	Daya beli naik 10–15%
Data Sasaran	Penurunan jumlah warga miskin dalam DTKS	Ngupasan: turun 32%, Prawirodirjan: turun 35%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa initial outcomes PKH di Gondomanan cukup nyata dan positif. Anak-anak lebih terjamin akses sekolahnya, keluarga lebih rajin memanfaatkan layanan kesehatan, pola konsumsi lebih stabil, dan data sasaran semakin akurat sehingga bantuan lebih tepat guna. Hal ini menegaskan bahwa PKH bukan sekadar memberikan bantuan tunai, tetapi juga mendorong perubahan perilaku sosial-ekonomi keluarga miskin sejak tahap awal implementasi.

4. Simpulan

Penelitian mengenai implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kemantren Gondomanan menunjukkan bahwa program-program seperti PKH, BST, dan pemberdayaan masyarakat telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh berbagai kendala, terutama masalah validitas data DTKS, keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, serta ketergantungan pada kebijakan pusat. Analisis *policy output* memperlihatkan bahwa meskipun cakupan bantuan relatif luas, masih terdapat bias sasaran, kesulitan akses, serta ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dari sisi *policy outcomes*, program telah memberi dampak awal berupa berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatnya partisipasi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang dampaknya belum signifikan karena masalah struktural seperti keterbatasan lapangan kerja dan ketimpangan pendapatan masih kuat.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, pemerintah daerah perlu memperbaiki validitas DTKS melalui verifikasi data yang lebih partisipatif, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan porsi anggaran untuk program pemberdayaan ekonomi produktif. Selain itu, kapasitas pendamping sosial perlu diperkuat dengan menambah jumlah tenaga dan pelatihan, agar mampu memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada KPM. Pemerintah juga perlu membuka ruang inovasi kebijakan di tingkat kemantren, sehingga program tidak hanya mengadopsi model dari pusat tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonomi.

5. Daftar Pustaka

- Asyavira, A. A., Puspaningtyas, A., & Wahyudi, E. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e- ISSN: 2797-0469), 4(06), 15–22. <https://doi.org/10.69957/praob.v4i06.1667>
- Bappeda Kota Yogyakarta. (2023). *Laporan Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta*.
- Bappeda Kota Yogyakarta. (2024). *Laporan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Dari, D. W., Apriliyani, D., & Handayani, W. (2022). *Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong*.
- Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. (2023). *Laporan Posyandu dan Status Gizi*.
- Dyas, E. W., & Agustina, I. F. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Web of Scientist International Scientific Research Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i1.28>
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1). <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
- Kemensos. (2020). *Kemensos Kembangkan Satu Data untuk Penerima Manfaat dan LKS*. <https://kemensos.go.id/ar/kemensos-kembangkan-satu-data-untuk-penerima-manfaat-dan-lks>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2023*.
- Larasati, D. C. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2).
- Nengyanti, N., Lestari, D. P., & Isabella, I. (2019). Faktor Penghambat dan Pendorong Penerapan Gender Responsiveness Dalam Penyusunan Program / Proyek/Kegiatan Program Kemiskinan (Studi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.648>
- Nugraha, A. B. (2022). *Program Gandeng Sebagai Model Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 44 Tahun 2021*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/200735/perwali-kota-yogyakarta-no-44-tahun-2021>
- Rahman, A., & Alqarni, W. (2023). Implementasi Dana Otonomi Khusus Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2).
- Saragih, J. P. (2019). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *P3DI Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Sawitri, N., & Rahmat, W. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaca Pengetasan Kemiskinan di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.200>
- Sipahutar, C., Hitalessy, Y. S. K., & Putri, Q. A. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Yogyakarta: Tinjauan Penerapan Regulasi dan Otonomi Khusus. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 4(1), 107–118. <https://doi.org/10.33830/humaya.v4i1.9104>
- Syamsulhakim, E., & Khadijah, N. (2020). Graduasi dari Program Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia: *World Bank*.
- Widjaja, L. (2023). Pengaruh Growth Opportunity, Profitabilitas, Leverage, Tangible Asset Terhadap Cash Holding Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.24912/jpa.v5i2.23630>

- Wijayanti, I., Meilina, T., & Dhiu, M. F. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH): Studi Kasus Rt 14, Karangwaru, Tegalrejo, Kota Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1).
- World Bank. (2021). *PKH Social Assistance Review*.
- Zaini, A. (2021). *Kemiskinan di Daerah Kaya Sumberdaya Alam, Sebuah Paradoks Pembangunan*.